



CCRPS
Center for Cultural Research
and Policy Studies
UMMA, Malang



Karena menulis adalah
sebuah proses mengamati,
berpikir, menciptakan
dan merenungkan.

Melihat kekinian Aceh
dalam perspektif penulis
menjadi sebuah 'senjata'
yang bermanfaat bagi
perkembangan Aceh.



MERANGKAI KATA DAMAI

Lahir dari sebuah program Katahati Institute yang bekerjasama dengan CCRPS (Center for Conflict Resolution and Peace Studies) IAIN Ar Raniry dan didanai oleh masyarakat Jepang. Program yang bertabel 'Studi Antropologi dan Jurnalisme Damai', mendidik para jurnalis pemula, mahasiswa dan pelajar menjadi seorang penulis yang handal.

Dengan semangat penulis Aceh masa silam, katahati institute kemudian mengundang para penulis yang selama ini banyak terlibat dalam penulisan opini di media-media lokal atau nasional. Mereka adalah para akademisi, aktivis, jurnalis sampai mahasiswa. Kumpulan tulisan ini disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Merangkal Kata Damai.

© 2009, Katahati Institute,
Jl. Lamreung No-17 Ulee Kareng
Banda Aceh 23117, Indonesia
Telp.(0651) 7410466
Fax. (0651) 636947
Email: info@katahati.or.id
Website: www.katahati.or.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

xii + 210 h. 20 x 25 cm.
ISBN 978-979-16458-2-9

Sampul dan susunan isi dengan huruf Myriad
dirancang oleh Khairul Umami.

Daftar Isi

ix PENGANTAR

- 1 **DAMAI ACEH, DAMAI KITA**
DRH. IRWANDI YUSUF, M.SC
- 5 **SEDIKIT (LAGI) TENTANG PERDAMAIAN ACEH**
REZA IDRIS MOHD. ROEM
- 11 **MENGGAPAI HARMONI SETELAH BERDAMAI**
MATHUR YAHYA
- 13 **MERAWAT DAMAI DENGAN HATI**
SEHAT IHSAN SHADIQIN
- 17 **PANGLIMA AHTISAARI**
MUNAWARDI ISMAIL
- 23 **DARI HELSINKI TURUN KE ACEH**
MUNAWARDI ISMAIL
- 27 **ACEH: SEBUAH REFLEKSI PERGERAKAN
DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN**
MAMUIN
- 33 **ISU-ISU KRITIS DALAM PEMBANGUNAN
PERDAMAIAN ACEH**
SAIFUDDIN BANTASYAM SH MA
- 41 **DAMEE-DAMEE**
MUKHTARUDDIN YAKOB
- 45 *Akhir Jeritan:*
ACEH MASUK BABAK BARU
MUHAMMAD HAMZAH

- 51 **TINTA DAMAI**
SAIFULLAH
- 57 **JURNALISME DAMAI**
MUHAMMAD SAMAN
- 65 **PERDAMAIAN ACEH BERTOPENG SEBELAH**
THAMREN ANANDA
- 73 **4 TAHUN TANPA KEBENARAN**
HENDRA FAOLI
- 77 **ACEH DI TANGAN IRWANI-NAZAR**
MUKHILISUDDIN RYAS
- 83 **MANDEKNYA IMPLEMENTASI MOU DAN UU PA,
KESALAHAN SIAPA?**
ARYOS NIVADA
- 93 **POTENSI ULAMA DALAM MEMPERTAHAKAN
PERDAMAIAN ACEH**
MORINA OCTAVIA
- 99 **SENSITIVITAS KONFLIK**
RISMAN A RACHMAN
- 105 **MAKNA PERINGATAN MOU PERDAMAIAN RI-GAM**
RAIHAL FAJRI
- 109 **ACEH : AGENDA KRUSIAL DALAM FASE TRANSISI**
BULMAN SATAR
- 121 *Aceh Baru:*
SEBUAH WACANA PEMIKIRAN
EFFENDI HASAN
- 127 **WALI DAN PERJUANGAN RAKYAT ACEH**
EFFENDI HASAN
- 133 **LUBANG HITAM DI ERA TRANSISI ACEH**
SUADI (ADI LAWUENG) SULAIMAN
- 139 **PASAR PERDAMAIAN**
YUNIDAR Z.A

- 147 **MENJAGA PERDAMAIAN, MEMUPUK KEARIFAN LOKAL**
BUSTAMI ABUBAKAR
- 155 **PERDAMAIAN ITU SEPERTI GUNUNG PASIR**
TEUKU KEMAL FASYA
- 161 **KORUPSI DAN PERDAMAIAN DI ACEH**
ISKANDAR ZULKARNAEN DAN TUBAGUS ERIF FATURRAHMAN
- 169 **SABANG, PAX ROMANA, DAN KEMAKMURAN**
AHMAD HUMAM HAMID
- 175 **APBA DAN PERDAMAIAN DI ACEH**
ABDULLAH ABDUL MUJTHALEB
- 187 **MERAWAT PERDAMAIAN DENGAN MEMUTUS RANTAI
SIKLUS KONFLIK ACEH**
MARZI AFRIKO
- 193 **UUPA DAN DAMAI ACEH**
TAGWADDIN
- 199 **SEBUJ LADA UNTUK PERDAMAIAN**
AS'ADI MUHAMMAD ALI
- 205 **PEREMPUAN DAN PEMILU PASCADAMAI DI ACEH**
SRI WAHYUNI

Bustami Abubakar

Dosen Antropologi pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry

Menjaga Perdamaian, Memupuk Kearifan Lokal

Aceh pascatsunami adalah Aceh yang baru. Dari aspek pembangunan, kebaruan itu terlihat dari tersedianya ragam sarana dan prasarana publik yang lebih baik. Tata ruang wilayah terutama kawasan perkotaan juga terlihat lebih asri dan terbuka, sehingga kesan sumpek dan awut-awutan relatif mengalami degradasi, kendati dalam taraf yang belum maksimal. Dari aspek sosial budaya, Aceh yang baru pun mudah diamati. Munculnya para borjuis baru yang didominasi oleh kalangan muda merupakan sebuah indikasi terjadinya pergeseran kelas sosial dalam masyarakat. Prilaku masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup drastis sebagai konsekuensi dari kosmopolitanisme Aceh terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari berbagai pelosok bumi.

Dari aspek politik, kebaruan Aceh pascatsunami berpunca dari penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kendati penandatanganan MoU itu merupakan klimaks dari proses panjang yang telah dilakukan oleh kedua pihak bertikai plus mediator asing, namun musibah tsunami tampaknya menjadi pelecut bagi terbukanya gerbang perdamaian bagi Aceh. Inilah pembuktian dan hikmah yang diberikan Tuhan kepada masyarakat Aceh melalui kalam-Nya yang Maha Benar:

"*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*" (Q.S. 94:6).

Aceh pascakesulitan, baik karena konflik politik yang demikian panjang maupun karena musibah gempa dan tsunami, adalah Aceh yang memiliki banyak kemudahan. Kemudahan itu dikarenakan oleh tersedianya sarana dan prasarana publik yang relatif lebih baik, sehingga memberi akses kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas keseharian mereka, terutama dalam rangka memutar roda perekonomian. Kemudahan itu juga dikarenakan oleh banyaknya lembaga-lembaga donor yang memberikan ragam bantuan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih terberdayakan. Kemudahan lain yang cukup penting dan vital adalah situasi dan kondisi daerah yang semakin baik, tenang, damai, dan kian menjauh dari perang, sebagai manifestasi dari MoU Helsinki.

Lalu, setelah kemudahan-kemudahan itu kita peroleh, apa langkah berikutnya? Merujuk kepada Q.S. 94:7, Allah menyeru Muhammad SAW untuk tidak berpangku tangan manakala suatu pekerjaan telah berhasil dilakukan. "*Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)*". Ayat inilah sejatinya yang menjadi referensi utama kita dalam menjaga keberlangsungan ragam kemudahan yang telah diperoleh pascatsunami dan MoU Helsinki. Ini bermakna bahwa menjaga dan melestarikan perdamaian menjadi sebuah keniscayaan, tanpa dapat ditawar.

Beberapa Agenda

MoU Helsinki ternyata telah membawa perubahan di Aceh di luar perkiraan banyak orang. Di antara butir MoU yang memberi peluang besar pada perubahan masa depan Aceh adalah kewenangan menjalankan tata pemerintahan Aceh secara khusus dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kewenangan ini disahkan secara yuridis melalui UU RI No. 11 Tahun 2006, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kehadiran UUPA sama sekali tidak bermakna bahwa Aceh telah menjadi bagian yang terpisah dari kedaulatan Indonesia. Mengingat sebagian masyarakat Aceh dalam masa konflik telah menyatakan secara eksplisit hendak memisahkan diri dari NKRI, maka ketika MoU Helsinki ditandatangani, keinginan seperti itu mau tak mau

harus dicairkan. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga perdamaian adalah memperkuat semangat reintegrasi masyarakat Aceh yang sebelumnya telah mengalami penyusutan. Semangat reintegrasi ini tidak bisa dihembuskan melalui doktrin-doktrin nasionalisme, bujukan-bujukan politik konyol, atau bahkan janji-janji dari "syurga", melainkan melalui sikap yang tidak diskriminatif, bersahabat dan damai yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh. Jika semangat reintegrasi ini berhasil dipupuk dan bersemi dengan baik, maka itu akan menjadi salah satu garansi bagi lestainya perdamaian di bumi Aceh.

Kebijakan yang Pro Rakyat

Kewenangan menjalankan pemerintahan Aceh dengan otonomi yang sangat luas di tengah melimpahnya dana pembangunan yang berasal dari negara-negara donor dan kompensasi dana Migas Aceh, senyatanya menjadi modal utama bagi Pemerintah Aceh di bawah duet Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar untuk membangun Aceh baru, yaitu Aceh yang bebas dari penindasan kemanusiaan dan kapitalisme. Pembangunan Aceh baru sejatinya berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemda Aceh sepatutnya membangun infrastruktur daerah yang memadai yang memudahkan akses bagi peningkatan produksi dan pemasaran hasil-hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sekadar contoh, sudah saatnya Aceh memiliki industri pengolahan hasil bumi, sehingga petani Aceh tidak langsung menjual hasil panen yang masih mentah ke Medan sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam kondisi seperti sekarang, hal itu sangat mungkin dilakukan dengan atau tanpa harus menunggu investasi dari negara asing. Sejauh ini Pemda Aceh terlihat sangat intensif berkunjung ke berbagai negara dalam rangka mengajak pihak asing untuk berinvestasi di Aceh. Pemda tentu punya alasan tersendiri mengambil kebijakan demikian. Akan tetapi, kebijakan tersebut diharapkan tidak sampai menjerumuskan Aceh ke dalam bentuk penjajahan ekonomi baru dan terjerembab ke dalam pusaran kapitalisme internasional.

Masyarakat Aceh kini tengah menanti kebijakan Pemda untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berorientasi pada peningkatan hajat hidup dan

kemakmuran rakyat, hal mana yang telah cukup lama absen sebagai akibat dari gejala politik di daerah ini. Prasyarat untuk itu tentu saja wujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*clean & good governance*), yaitu pemerintahan yang ditegakkan atas prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Selain itu, dukungan dari parlemen juga menjadi sebuah keniscayaan. Jika tidak, kebijakan yang dihasilkan tidak akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan akan berupa penggembungan kesejahteraan golongan yang telah sejahtera.

Masyarakat Equilibrium

Jika kebijakan pemerintah yang memihak pada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat telah dapat ditetaskan, maka strategi berikutnya adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menapaki tangga-tangga menuju kesejahteraan itu. Akses tersebut sejatinya dibuka secara proporsional dan jauh dari diskriminasi. Sehingga setiap anggota masyarakat Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Akses dimaksud dapat berupa pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pemerolehan informasi, pembayaran upah berdasarkan prinsip keadilan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, pembagian pendapatan atau tunjangan yang berimbang, dan sebagainya. Jika ini dilakukan, maka kesenjangan sosial akan semakin sempit yang berimplikasi pada mengerucutnya tindakan-tindakan anti sosial, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.

Realitas sekarang memperlihatkan kesenjangan sosial yang begitu menganga dalam kehidupan masyarakat Aceh. Persis bak syair yang dinyanyikan Rhoma Irama: "yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin." Perbedaan pendapatan antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah mencapai ratusan kali lipat, sehingga menimbulkan siklus patron dan klien. Yang lebih mencengangkan adalah disparitas tunjangan jabatan antara pegawai tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota yang begitu senjang. Situasi ini dapat memicu kecemburuan sosial. Dan ini merupakan bom waktu bagi ledakan *social disorder*.

Sudah waktunya kita membangun sebuah masyarakat equilibrium, yaitu

masyarakat baru yang memiliki keseimbangan (Effendy (2003:3). Masyarakat equilibrium mengenal konsensus sosial, seperti kelas dan status sosial, tetapi masyarakat ini hampir tidak menyadari adanya kesenjangan sosial. Masyarakat equilibrium menisbikan *superiority complex*, mengecam *homo homini lupus*, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pelestarian Budaya Lokal

Menjaga kelestarian budaya Aceh (lokal) merupakan salah satu strategi penting yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian perdamaian. Apa hubungannya pelestarian budaya lokal dengan pelestarian perdamaian? Bagi saya, pembangunan pascakonflik dan pelestarian perdamaian adalah sebuah proses dan sasaran yang hendak dituju. Rentetan sebuah proses dan ketercapaian suatu sasaran sangat ditentukan oleh aspek manusia sebagai subjek pelakunya. Karena itu, memahami karakter dan budaya pelaku perdamaian menjadi sesuatu yang urgen dan *sine qua none*.

Jika budaya masyarakat setempat tidak mengenal konsep perdamaian (*natural society*), maka setiap konflik yang terjadi antarindividu atau kelompok masyarakat itu akan cenderung diselesaikan dengan kekerasan. Lantas, bagaimana halnya dengan budaya Aceh? Pada dasarnya, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang cinta perdamaian, sebagaimana anjuran agama Islam yang mereka anut. Semangat cinta damai ini terekspresikan secara eksplisit melalui pemberian salam dengan lafal "*assalamualaikum*" manakala seorang Aceh berpapasan dengan teman-temannya bahkan dengan orang yang belum dikenal sekalipun. Jika seorang Aceh baik laki-laki maupun perempuan bertemu dengan teman lama, kerabat yang jarang bersua, atau orang-orang yang mereka hormati, maka setelah mengucapkan salam, mereka saling bersalaman.

Budaya salam, baik melalui ucapan maupun berjabat tangan, ketika saling bertemu dan berpisah, sesungguhnya merupakan ajaran bagi orang Aceh untuk hidup damai dengan segala makhluk Allah di muka bumi. Prinsip hidup damai sangat penting bagi orang Aceh, karena itu ia akan dipertahankan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jika ada pihak luar yang mencoba mengganggu

kedamaian orang Aceh, maka akan diperangi, sebagaimana halnya orang Aceh memerangi Belanda. Akan tetapi, bila kedamaian itu terusik oleh sengketa antarwarga masyarakat Aceh sendiri, maka sengketa itu akan dicarikan solusinya melalui kearifan budaya lokal yang biasanya dimediasi oleh aparat *gampong*, seperti *keuchik* dan unsur *tuha peut*.

Semangat cinta perdamaian yang bersemi di kalangan orang Aceh menjadikan mereka bersikap antipati kepada setiap bentuk pengkhianatan atau permusuhan. Karena itu, orang Aceh hanya mengenal teman atau sahabat yang setia, yang benar-benar sepekerjaan dan se penderitaan dengannya, yang tidak bersikap habis manis sepagh dibuang, yang tidak menggantung dalam lipatan atau menusuk dari belakang. Untuk sahabat seperti ini, orang Aceh rela mengorbankan apa saja, jika perlu harga diri dan nyawa pun dipertaruhkan.

Dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Belanda pada masa lalu, ada yang menyebutkan bahwa orang Aceh itu pendendam. Akan tetapi, sejarawan Aceh, Rusdi Sufi (2004:23), menolak karakteristik pendendam yang ditabalkan orang-orang Belanda terhadap masyarakat Aceh. Menurutnya, sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Aceh sebenarnya hanya mengenal kata *tueng bila* (menuntut bela). Sekilas konsep balas dendam dan *tueng bila* sulit dibedakan, namun jika ditelaah lebih jauh maka perbedaan keduanya terlihat secara nyata. Al-Quran melarang manusia melakukan balas dendam namun mewajibkan *qishash*. Istilah yang terakhir disebutkan itulah yang dimaksud dengan *tueng bila* dalam terminologi Aceh.

Sesuai dengan petunjuk Al-Quran (Q.S. 2:178; 5:45), *tueng bila* yang dipraktekkan masyarakat Aceh tidaklah bermotif dendam, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk mengembalikan harga diri atas kerugian atau rasa malu yang telah diterimanya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cinta akan perdamaian, pertumpahan darah, pembunuhan, atau tindakan lain yang menjatuhkan harga diri seseorang atau sekelompok orang (*kawom*) tidak selamanya diselesaikan dengan pertumpahan darah dan pembunuhan pula, melainkan seringkali diakhiri dengan cara perdamaian antarkeluarga di bawah tuntunan agama dan adat-istiadat setempat. Penyelesaian seperti ini kemudian dikenal sebagai perdamaian atas *adat*

meulangga, yang dapat dilakukan melalui pembayaran diyat dan *peusijuek*.

Enkulturasasi

Beberapa karakter budaya yang dimiliki masyarakat Aceh tersebut tentu tidak terlihat kentara lagi pada masa sekarang. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan karakter tersebut, di antaranya konflik dan tsunami. Akan tetapi, tampaknya karakter tersebut belum hilang, melainkan hanya memudar atau dalam proses perubahan. Karena itu, dalam rangka menjaga dan melestarikan perdamaian di Aceh, kiranya karakter budaya masyarakat Aceh di atas dapat digali dan ditumbuhkan kembali. Bagaimanapun, ia merupakan sebuah energi potensial yang dapat diproses menjadi energi kinetik, sehingga dengan memupuk kearifan lokal budaya masyarakat, perdamaian Aceh pun terselamatkan.

Untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis dan berkembang di tengah pusaran arus perubahan, dapat dilakukan melalui *enkulturasasi*. Koentjaraningrat (1990:233) mengartikan enkulturasasi sebagai proses pembudayaan. Dalam enkulturasasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.***

Menulis opini adalah berpendapat, ide atau pikiran terhadap topik yang sudah, sedang, belum dan akan terjadi. Opini tidaklah bersifat

objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Dan apabila di suatu saat bisa dibuktikan, maka dia menjadi sebuah fakta. Ada juga pendapat, opini yang dibangun dari fakta menjadi sebuah topik.

Dengan membuat sebuah penilaian dan tanggapan, maka kita telah mengubah fakta menjadi sebuah opini.

Hadinya buku ini tidak lain dimaksudkan untuk memaparkan pikiran-pikiran dan pendapat penulis atas perkembangan Aceh pasca-konflik yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam.

MERANGKAI KATA DAMAI

ISBN 979164582-5



9 789791 645820



katahati institute
jl. lamreung no. 17 blok karang
banda aceh 23117, indonesia
telp. (0651) 7410466 fax. (0651) 636947
email: info@katahati.or.id
website: www.katahati.or.id